

PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING TENAGA KERJA INDONESIA

Oleh:
Prof. Ir. Agus Suprpto, MSc., PhD

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Manajemen Wirausaha dan
Produktivitas “Merdeka”

Disampaikan dalam acara:
Konsultasi Publik dengan tema “Pembangunan
Perdagangan Jasa Melalui Kerjasama
Perdagangan Internasional”
Malang, 22 September 2015



PROFIL TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2014

**Angkatan Kerja =
125,32 jt**

Bekerja = 118,17 jt (94,30%)

Persewaan	= 40,55jt	(34,35%)
Industri	= 15,39jt	(13,02%)
Bangunan	= 7,21jt	(6,10%)
Perdagangan	= 25,81jt	(21,84%)
Angkutan	= 5,33jt	(4,51%)
Keuangan	= 3,19jt	(2,70%)
Qesa Kemasy.	= 18,48jt	(15,64%)
Qainnya	= 1,934jt	(1,64%)

SD	= 55,31jt	(46,80%)
GMP	= 21,06jt	(17,82%)
GMA	= 18,91jt	(16,00%)
GMK	= 10,91jt	(9,23%)
Diploma	= 3,13jt	(2,65%)
Qarjana	= 8,85jt	(7,49%)

Penganggur = 7,15jt (5,70%)

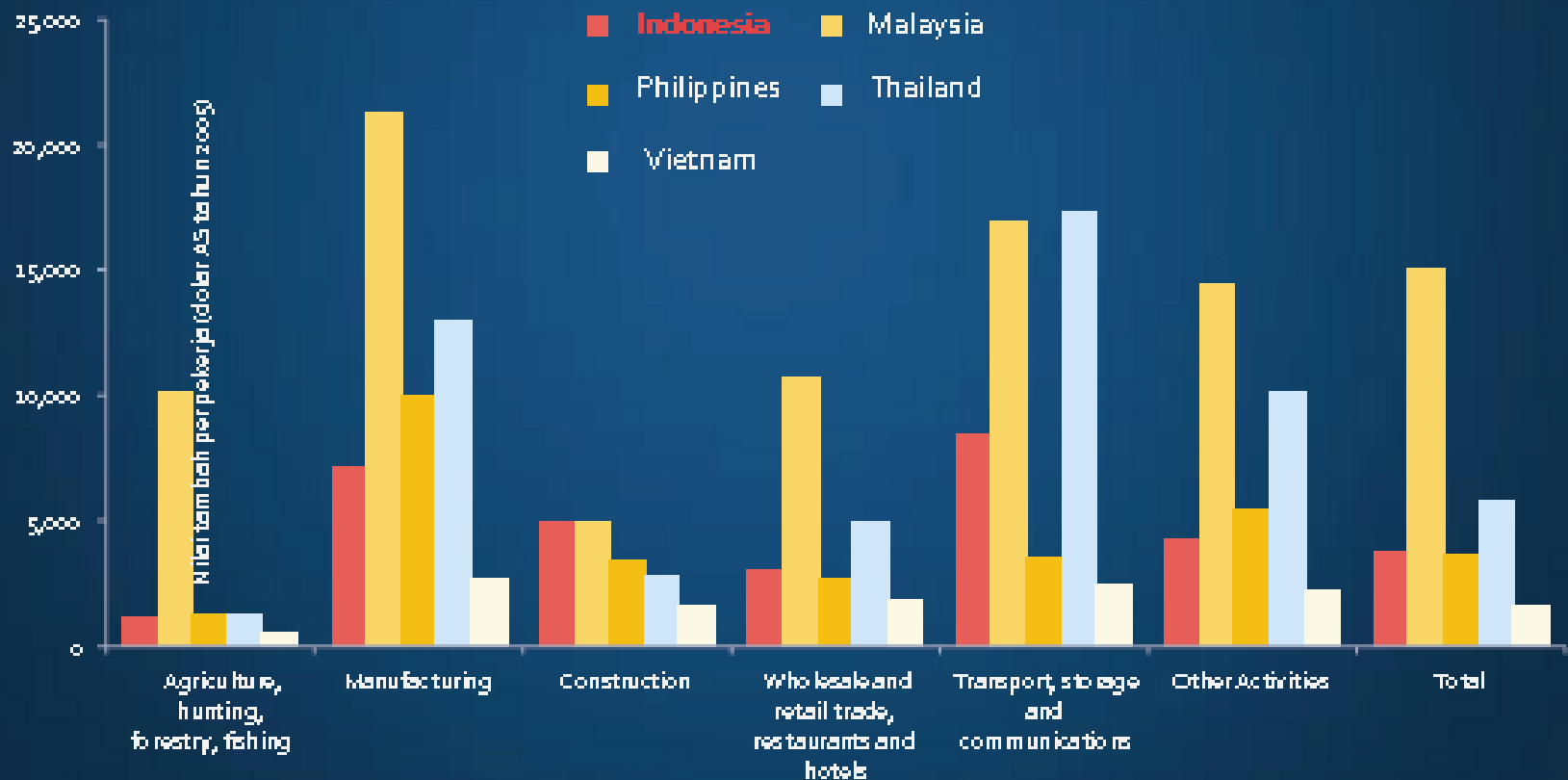
SD	= 2,12jt	(29,65%)
GLTP	= 1,69jt	(23,69%)
GLTA	= 1,89jt	(26,50%)
GMK	= 0,85jt	(11,86%)
Diploma	= 0,19jt	(2,73%)
Qniversitas	= 0,40jt	(5,57%)

Tabel 1
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2013–2015

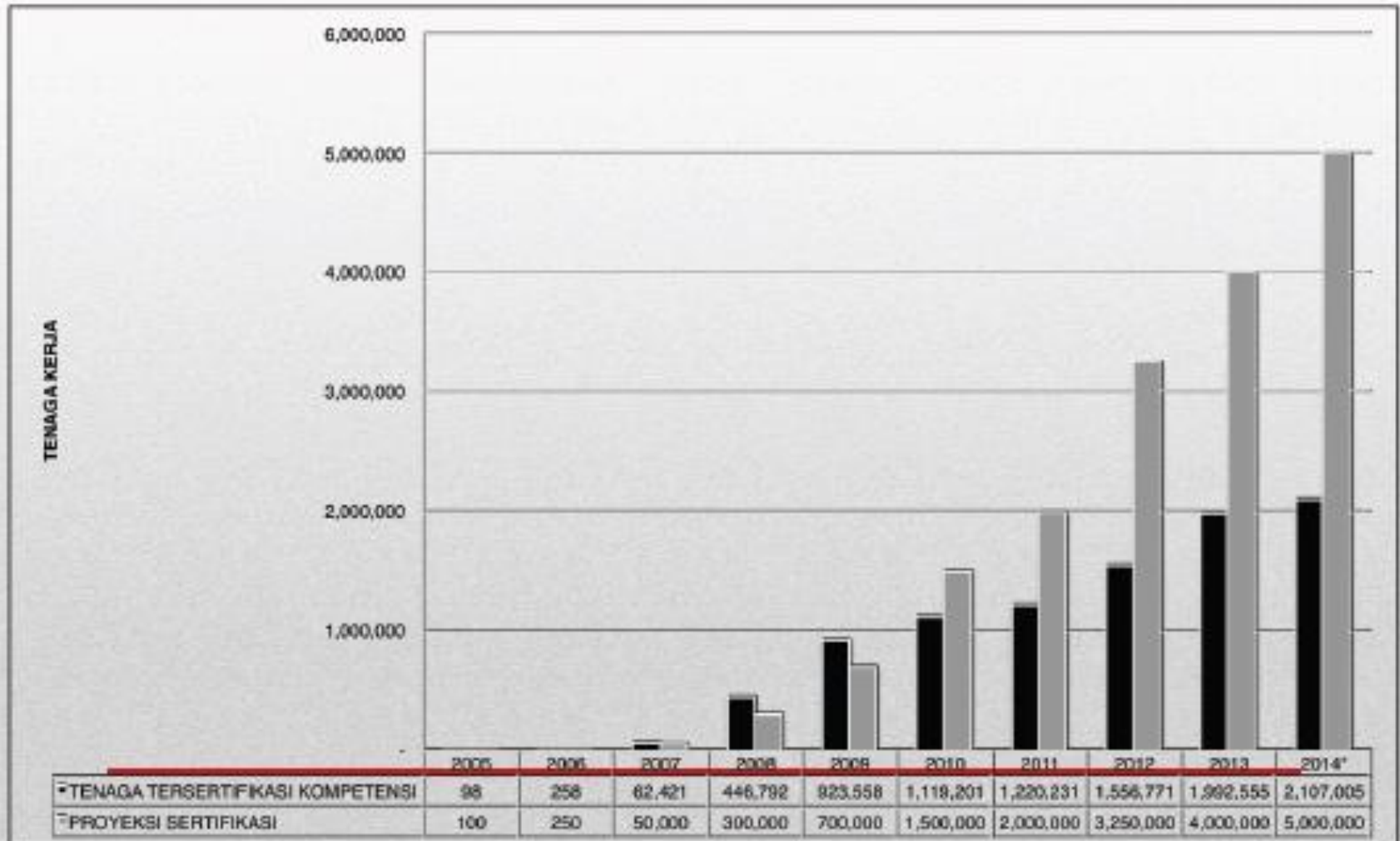
Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2013 ¹		2014 ²		2015
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angkatan Kerja	Juta orang	123,17	120,17	125,32	121,87	128,30
Bekerja	Juta orang	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85
Penganggur	Juta orang	7,24	7,41	7,15	7,24	7,45
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,15	66,77	69,17	66,60	69,50
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,88	6,17	5,70	5,94	5,81
4. Pekerja tidak penuh	Juta orang	36,39	37,74	36,97	35,77	35,68
Setengah penganggur	Juta orang	13,68	11,00	10,57	9,68	10,04
Penuh waktu	Juta orang	22,71	26,74	26,40	26,09	25,64

Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor tahun 2011: Membandingkan Indonesia dengan Negara ASEAN

(Sumber: Forum Employment, WB)



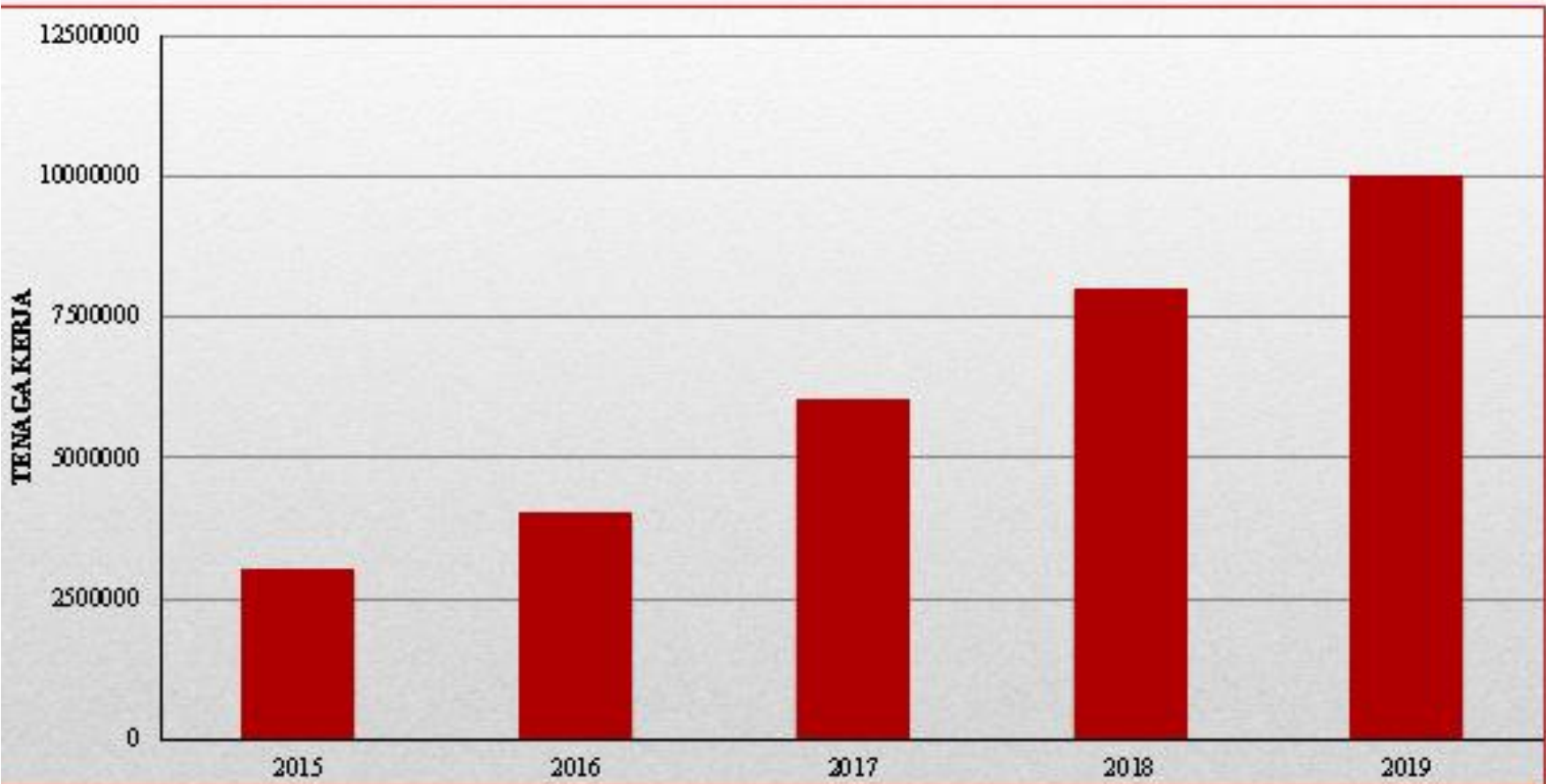
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI 2005 - 2014



Sumber:

Sumarna F.A., 2015 a

TARGET TENAGA KERJA TERSERTIFIKASI 2015-2019



Sumber:
Sumarna F.A., 2015 a

Kondisi saat ini

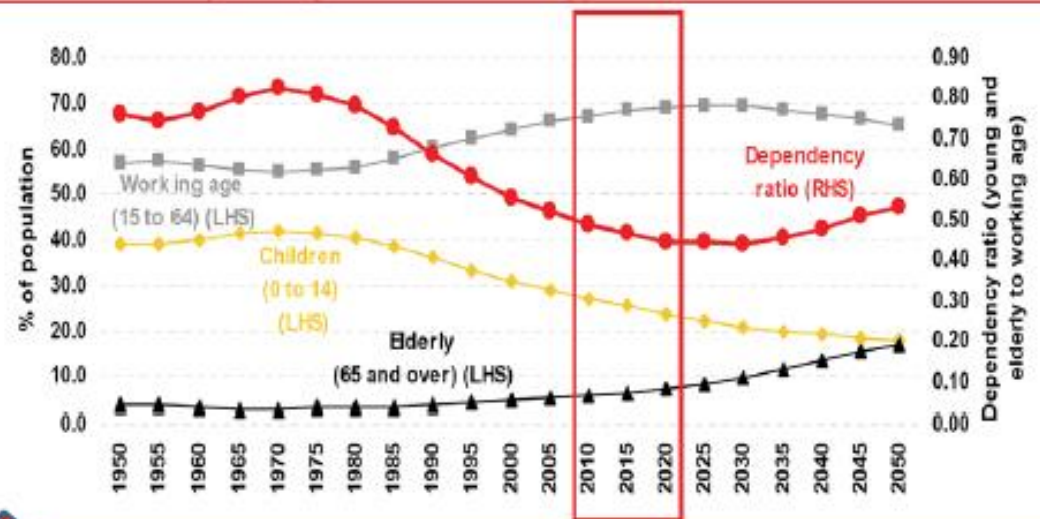


KONDISI DI ERA GLOBALISASI

- **Dunia terintegrasi dan *borderless*** (dilingkungan asean : AEC 2015)
- **Berkualitas tinggi yang akan menang** (bukan hanya di pasar barang dan jasa, tetapi juga di pasar tenaga kerja)

Kondisi Penduduk Indonesia

Penduduk Indonesia sebagian besar berada pada usia produktif 15 s/d 64 tahun



Demographic Bonus

Sumber:
Abdul Wahab, 2013

INDONESIA PASTI MENANG !!!!

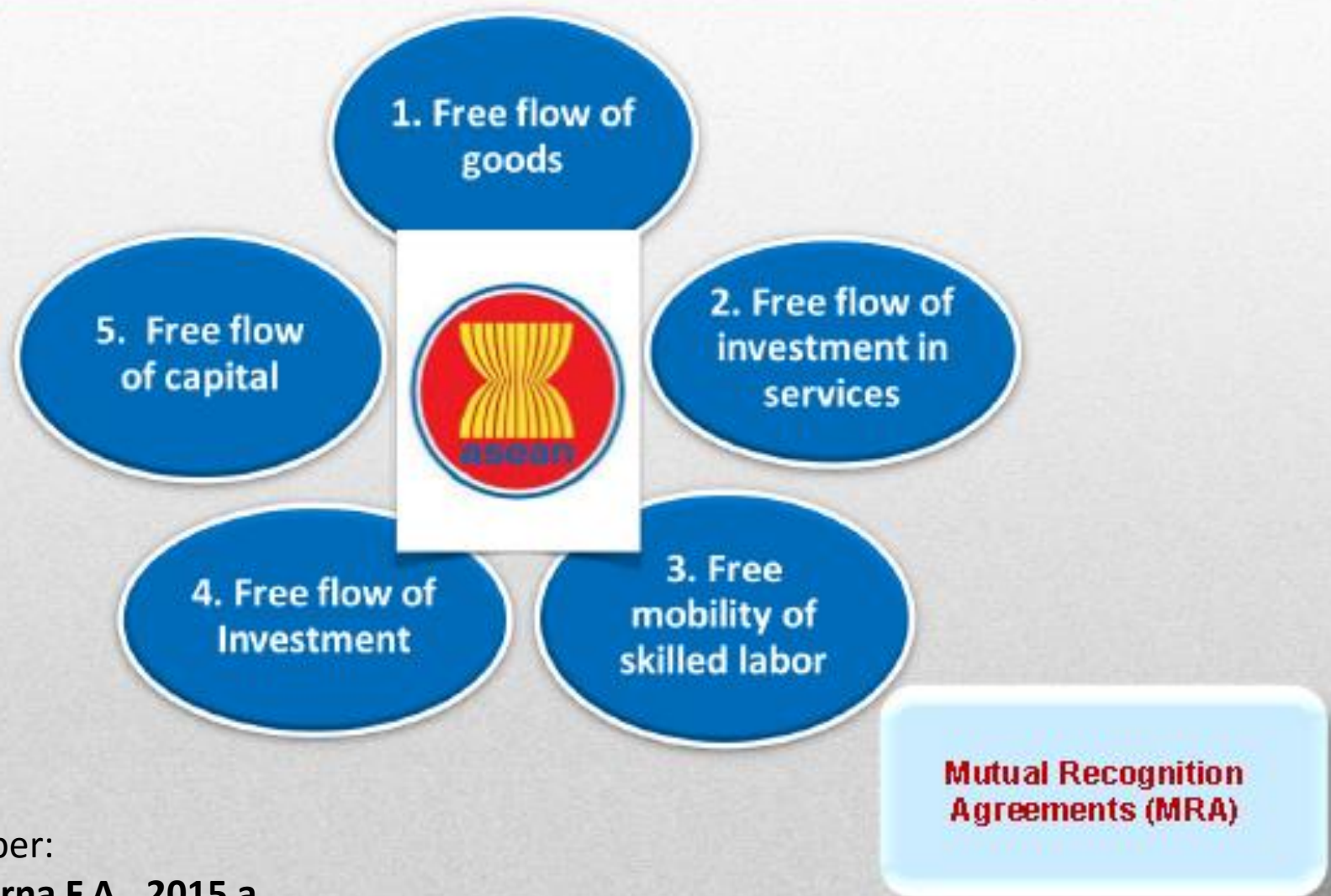
BONUS DEMOGRAFI

PROYEKSI PENDUDUK 2010-2035

Parameter	2010	2015	2020	2025	2030	2035
TFR	2,49	2,37	2,26	2,14	2,03	1,93
IMR	29,3	26,0	23,8	22,4	21,5	21,0
Usia harapan hidup (tahun)*		70,1	70,9	71,5	72,0	72,2
Pertumbuhan Penduduk (%)*	1,5	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6
Jumlah Penduduk (juta)	238,5	255,5	271,1	284,8	296,4	305,6
Usia 0 – 14 (%)	28,6	27,3	26,1	24,6	22,9	21,5
Usia 15 – 64 (%)	66,5	67,3	67,7	67,9	68,1	67,9
Usia 65+ (%)	5,0	5,4	6,2	7,5	9,0	10,6
Usia 60+ (%)	7,56	8,49	9,99	11,83	13,82	15,77
Rasio Ketergantungan (%)	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3

Keterangan: UHH dan LPP merupakan angka rata-rata dalam 5 tahun terakhir tahun rujukan

Lima Aliran Bebas (Free Flow) Barang dan Jasa Dalam Implementasi MEA 2015



Sumber:
Sumarna F.A., 2015 a

Implementasi MEA 2015 Pada Tahap Awal Di Prioritaskan Pada 12 Sektor



Sektor Prioritas

7 Sektor Barang :

1. Produk berbasis Agro;
2. Otomotif;
3. Elektronika;
4. Produk Karet;
5. Tekstil & Produk Tekstil;
6. Perikanan, dan
7. Barang dari Kayu

5 Sektor Jasa :

1. Penerbangan;
2. Jasa Online;
3. Pariwisata;
4. Kesehatan;
5. Logistik

Sumber:

Sumarna F.A., 2015

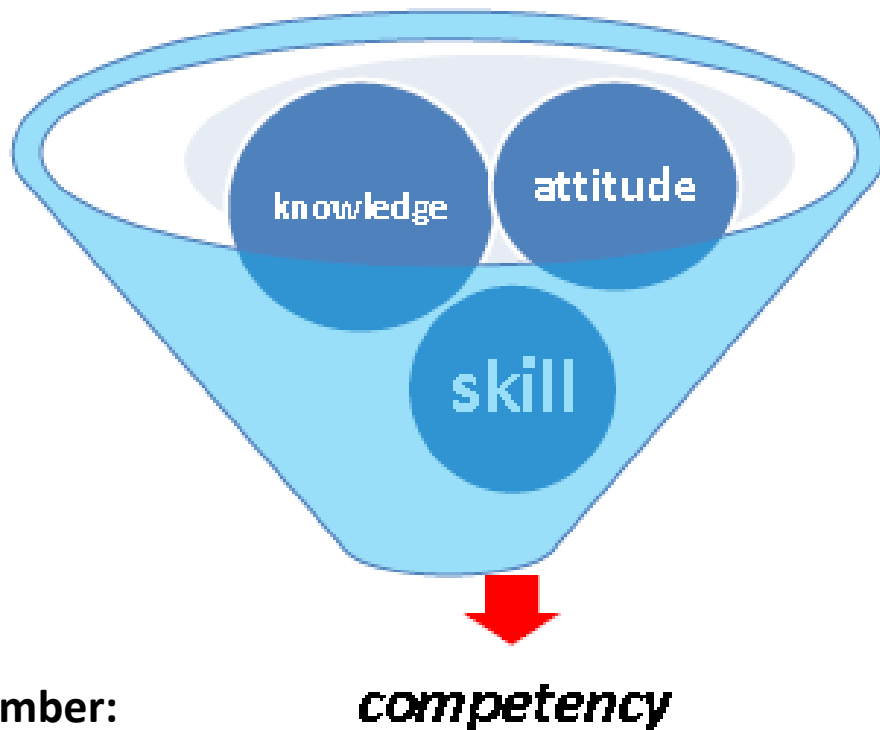


KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. 62-21-529 61311, Faks. 62-21-529 6045 6

UPAYA PENCIPTAAN TENAGA KERJA KOMPETEN di INDONESIA



- TK kompeten harus memiliki pengetahuan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, terampil melakukan pekerjaannya dan memiliki etos kerja yang baik
- Tanggung jawab semua pihak (Diknas, Nakertrans, Instansi lainnya dimasing-masing sektornya, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Sumber:
Abdul Wahab, 2013

STANDAR KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI

ACUAN / UKURAN
YANG DISEPAKATI

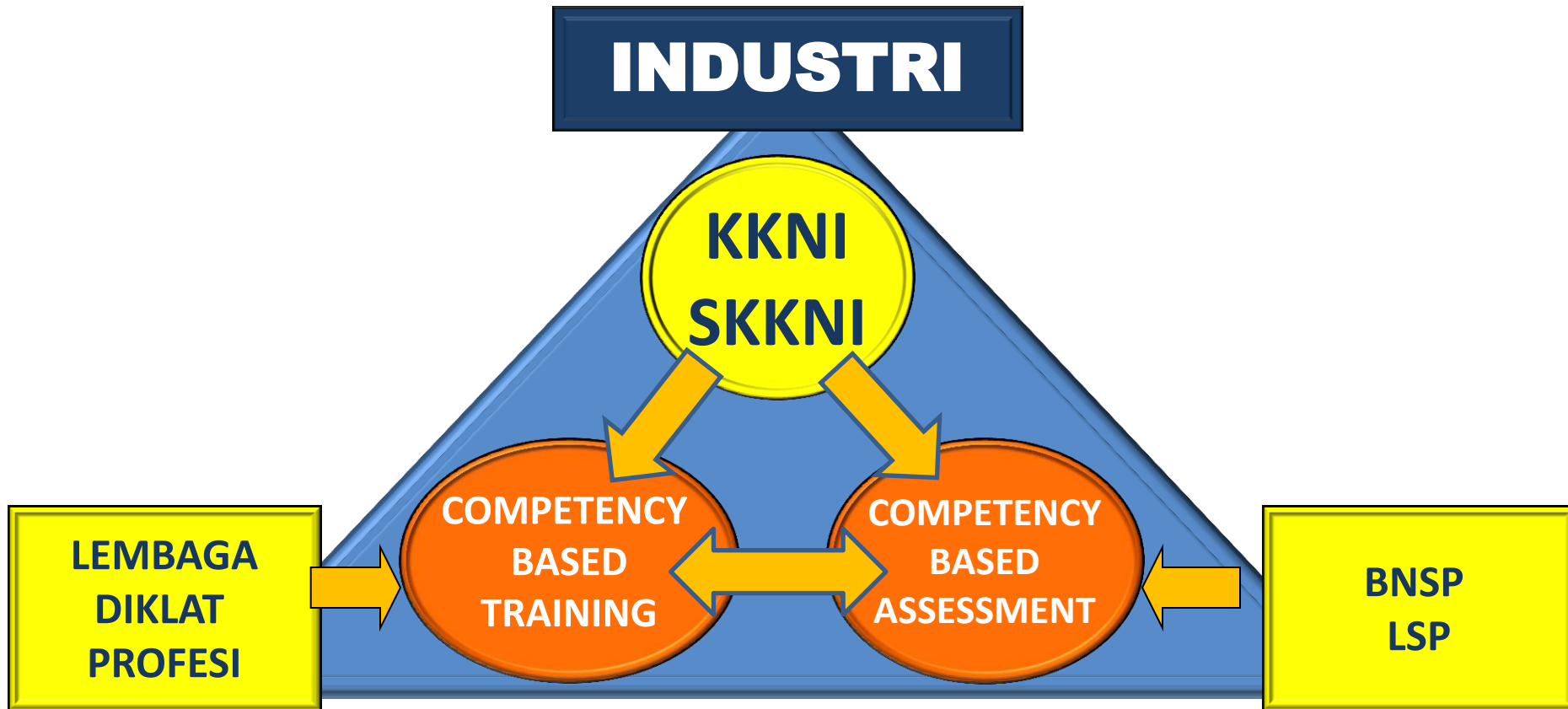
kemampuan yang
dilandasi oleh
pengetahuan,
keterampilan dan
didukung sikap
serta penerapannya
ditempat kerja yang
mengacu pada
**unjuk kerja yang
dipersyaratkan**

STANDAR
KOMPETENSI

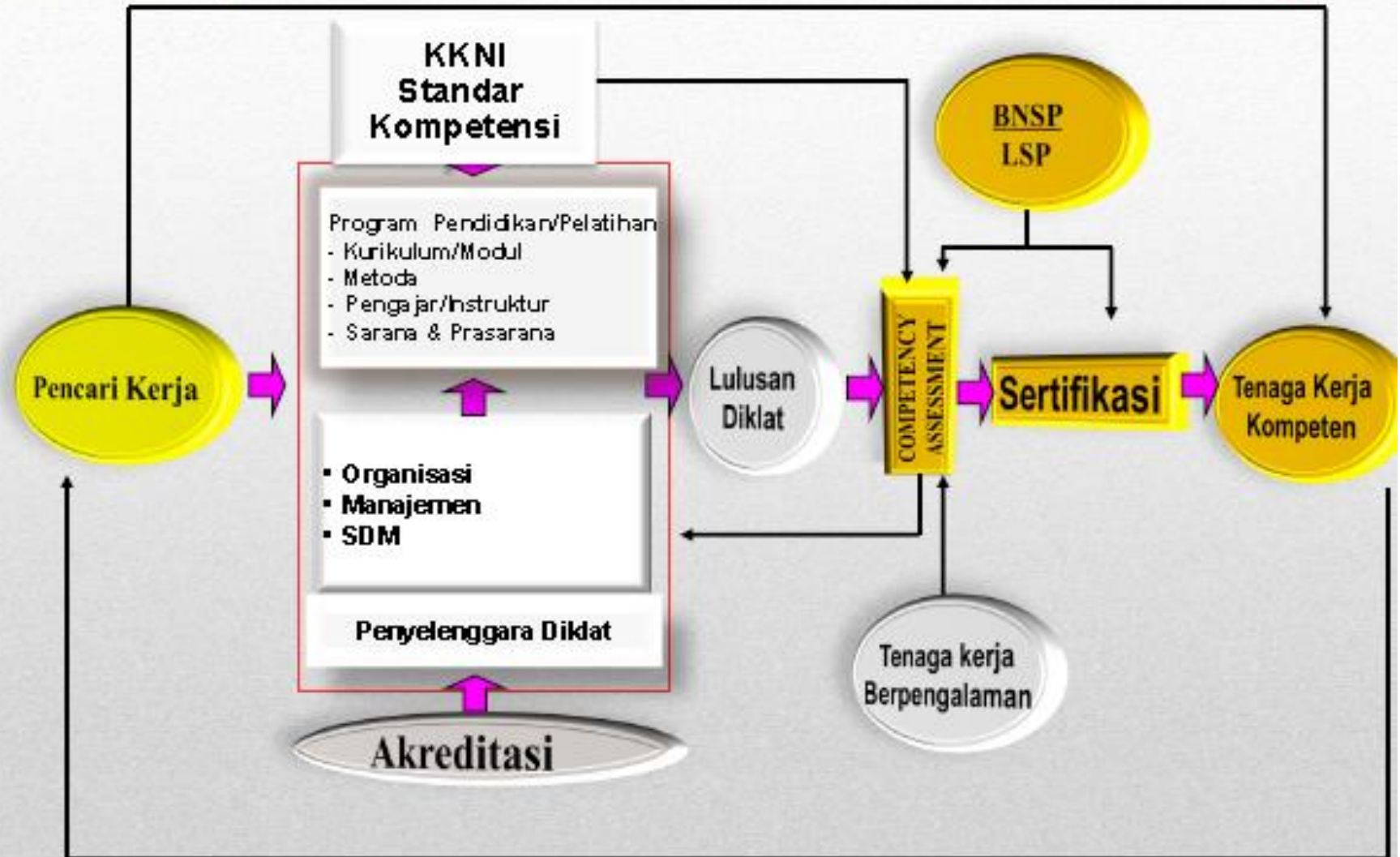
JENIS JENIS STANDAR MENURUT PP 31/2006 TENTANG SISLATKERNAS

- STANDAR KHUSUS
- STANDAR INTERNASIONAL
- STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

SEGITIGA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI



SISLATKERNAS



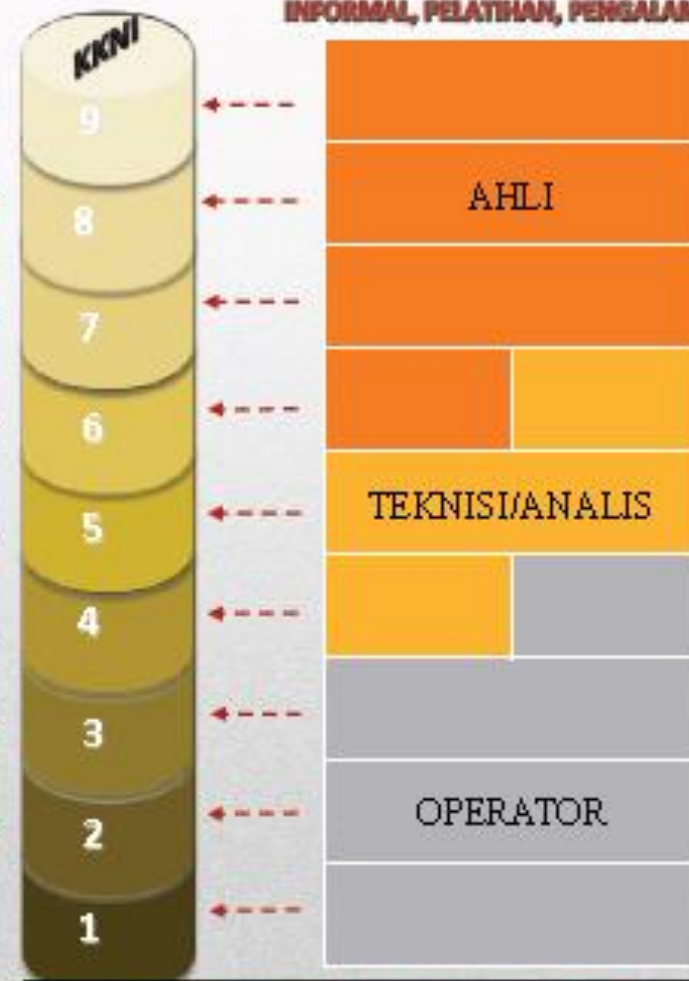
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

JENJANG PENDIDIKAN FORMAL



Permen Dikbud No.73/2013
Tentang Penerapan KKNI

JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN



Peraturan Presiden No.8/2012
Tentang KKNI

Sumber:

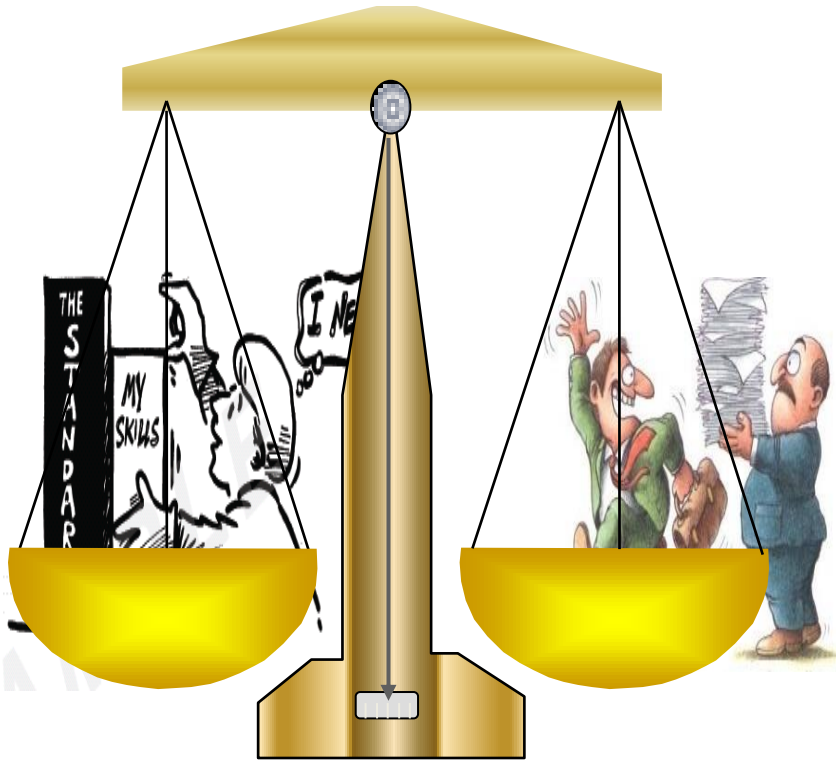
Sumarna F.A., 2015 a

SKKNI



adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan, Keterampilan dan/atau Keahlian serta Sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SERTIFIKASI KOMPETENSI



Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional.



**KOMPETEN /
BELUM
KOMPETEN**

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

BERTUGAS (ps1. 3)

Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

BERFUNGSI

1. Penetapan kebijakan standardisasi dan sertifikasi profesi
2. Akreditasi LSP
3. Pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)

ADALAH LEMBAGA YANG DIBERI
LISENSI OLEH BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)
UNTUK MELAKSANAKAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI

Jenis Lisensi BNSP



L i s e n s i

LSP-P3

- Asosiasi industri/profesi
- Pengakuan oleh sektor
- Dukungan regulator

LSP-P2

- Regulator/Pengguna
- Pengakuan oleh pihak terkait

**LSP-P1
Perusahaan**

- Perusahaan
- Pengakuan bersifat internal (Bagian integral Pengembangan SDM perusahaan)

LSP-P1 Diklat

- Lembaga diklat
- Bagian integral Program Diklat Berbasis Kompetensi

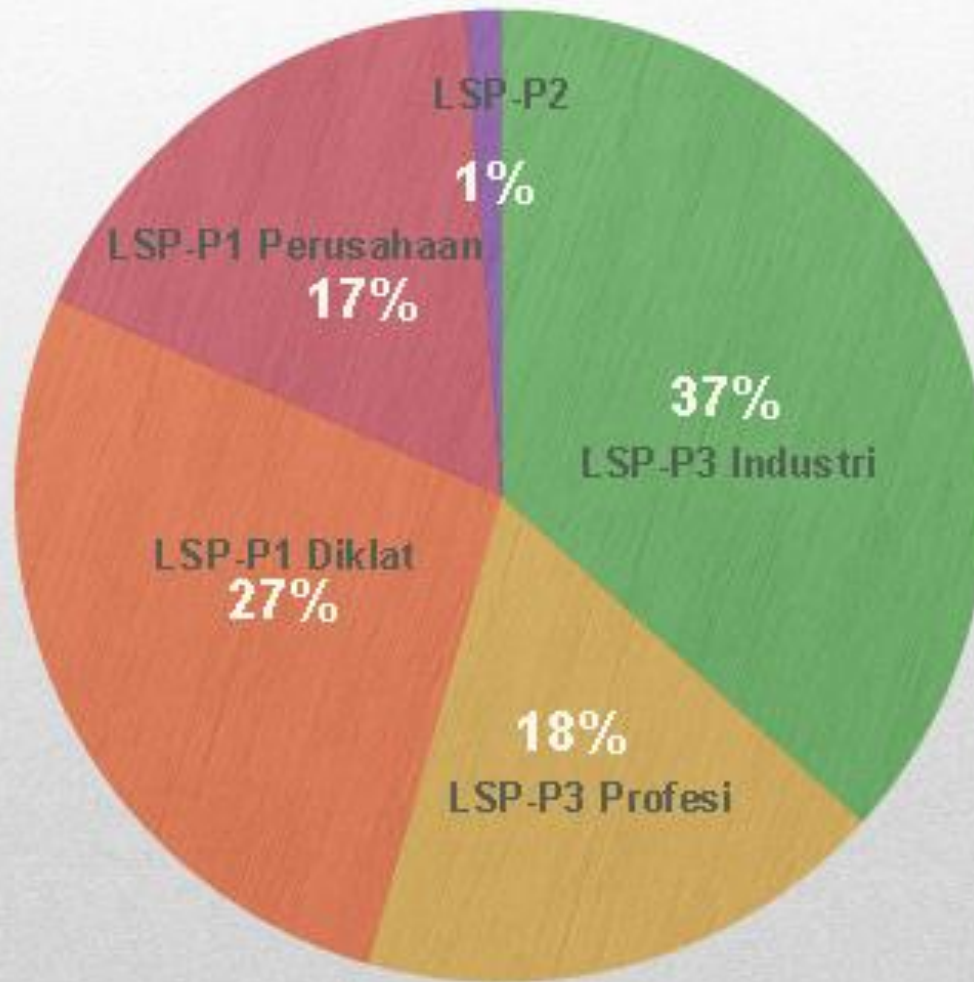
**Panitia Teknis
Uji Kompetensi**

- BNSP
- Untuk bidang profesi yang belum memiliki LSP

Sumber:

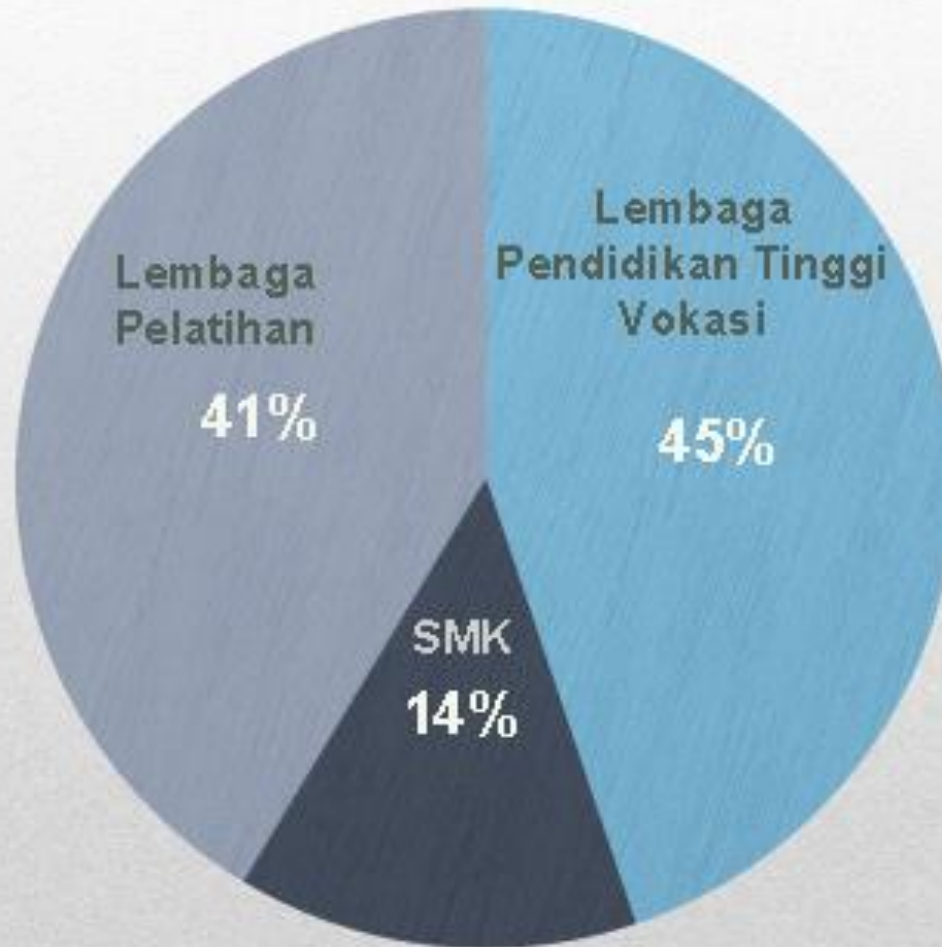
Sumarna F.A., 2015 a

Distribusi Jenis LSP Per Akhir 2014 (Total: 154 LSP)



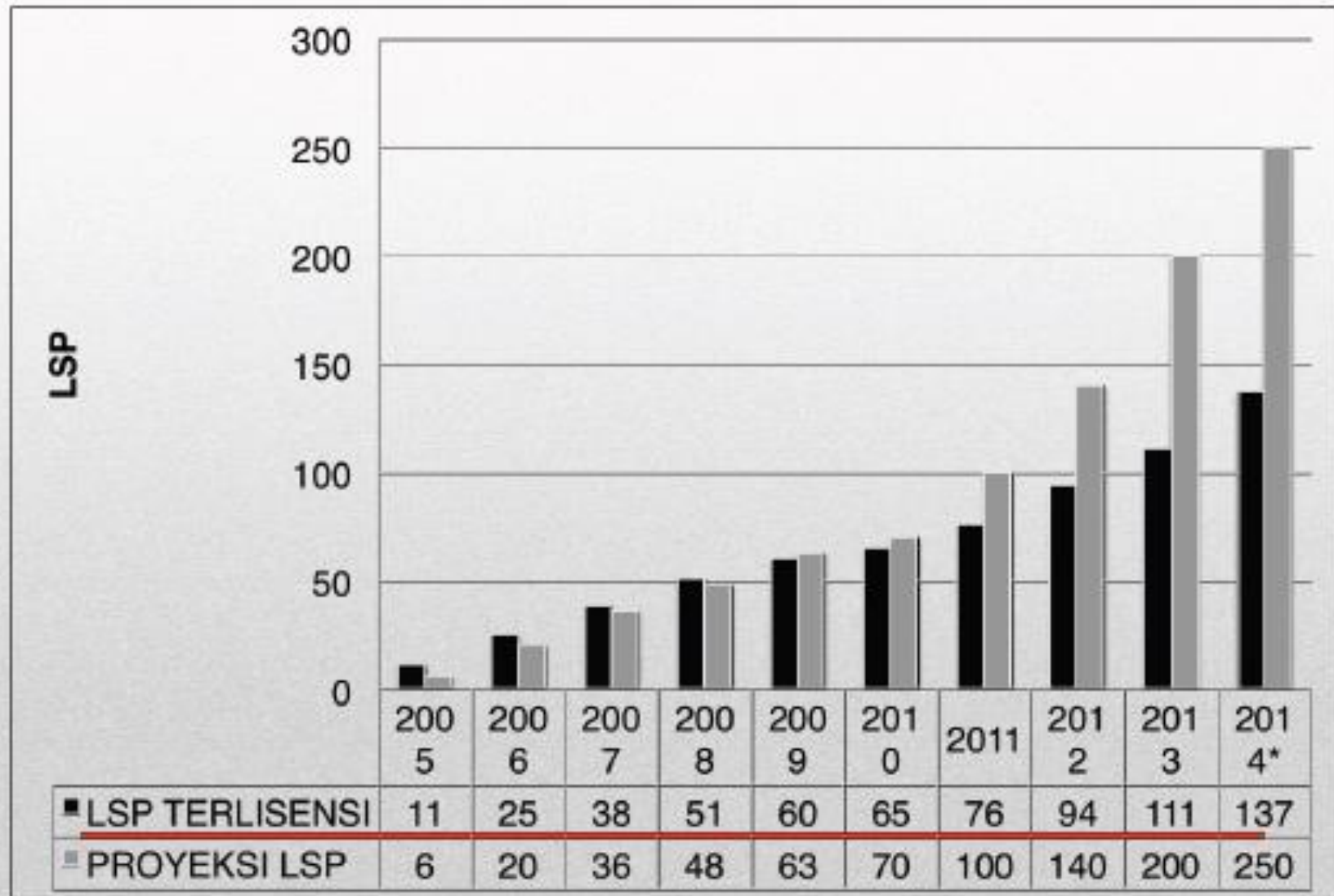
Sumber:
Sumarna F.A., 2015 a

Distribusi LSP-P1 Diklat (Total: 46)



Sumber:
Sumarna F.A., 2015 a

PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI LSP 2004 - 2014



Sumber:

Sumarna F.A., 2015 a

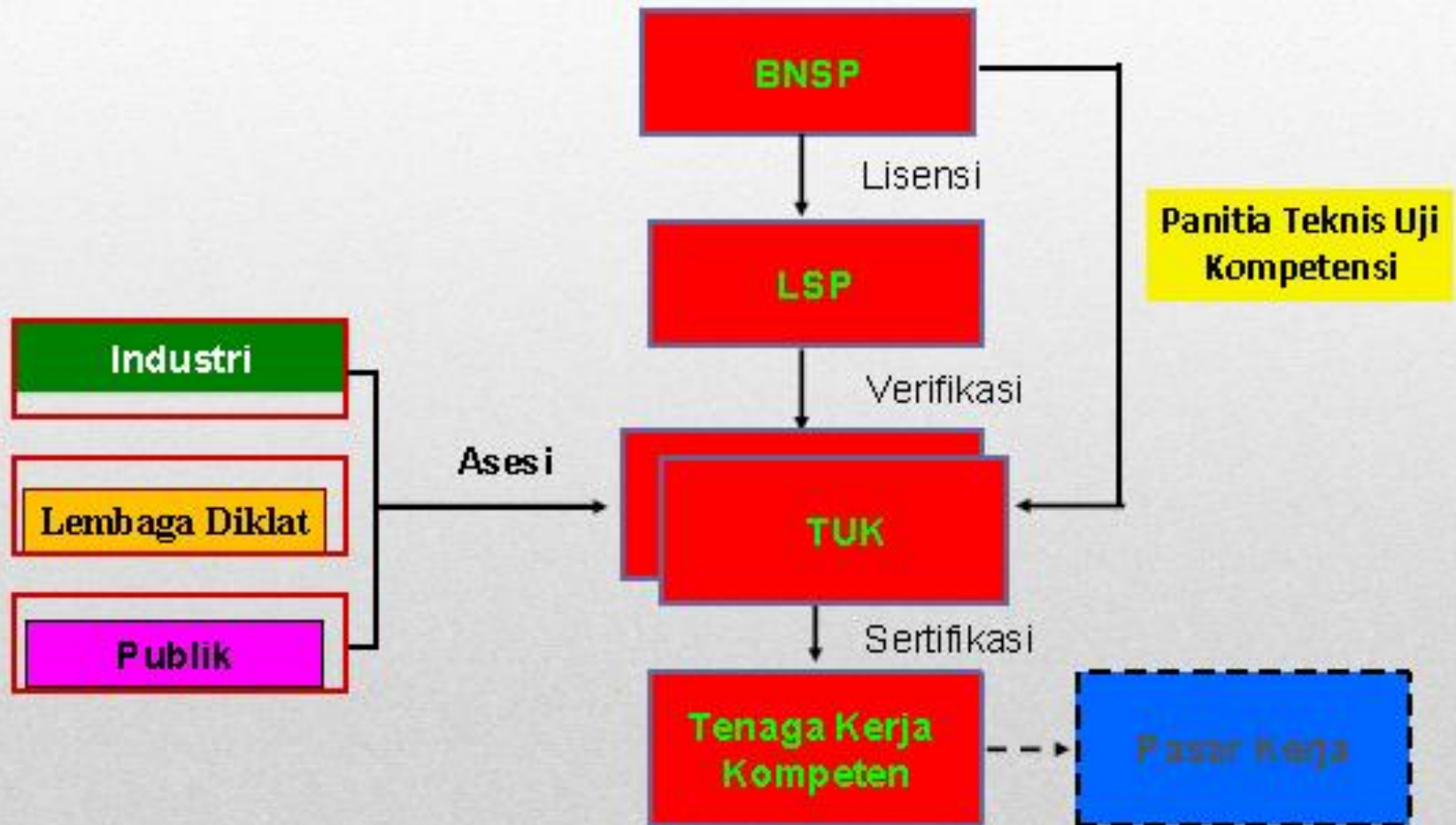
Target Capaian Jumlah LSP 2015 - 2019



Sumber:

Sumarna F.A., 2015 a

Mekanisme Sertifikasi Kompetensi



Aspek-Aspek Sertifikasi Kompetensi

Siapa yang diuji ?

PESERTA SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA



UJI
KOMPETENSI



ASESOR
KOMPETENSI



TEMPAT UJI
KOMPETENSI

Apa yang diujikan ?

STANDAR KOMPETENSI
KERJA



SKEMA SERTIFIKASI

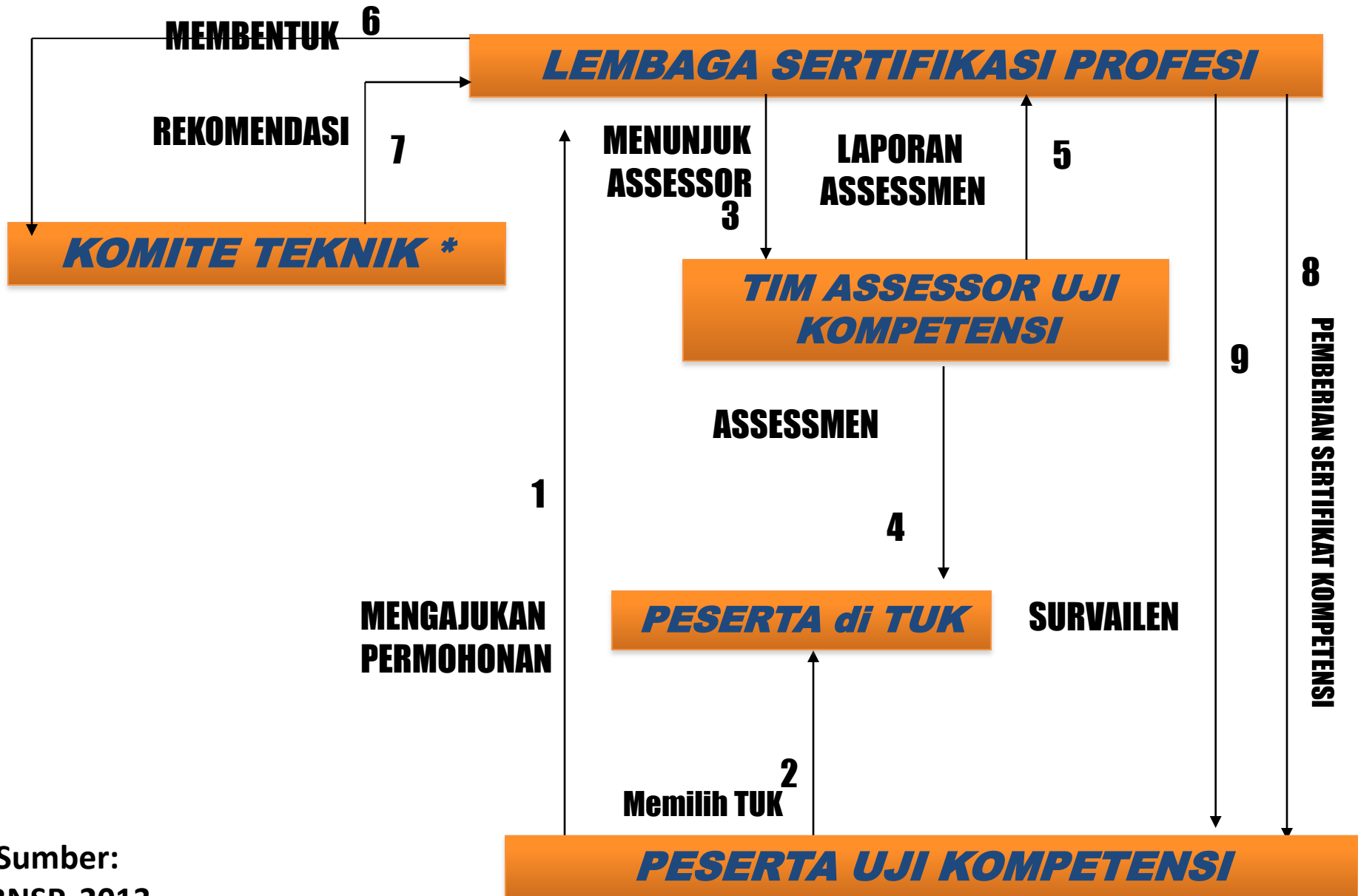


PERANGKAT/MATERI UJI
KOMPETENSI

Sumber:

Sumarna F.A., 2015 a

SKEMA UMUM SERTIFIKASI KOMPETENSI



Sumber:
BNSP, 2013

Manfaat sertifikasi

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	MANFAAT
1.	Industri	<ul style="list-style-type: none">• Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.• Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.• Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.
2.	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none">• Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.• Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.• Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.• Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara• Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja
3.	Lemdiklat	<ul style="list-style-type: none">• Membantu memastikan <i>link and match</i> antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.• Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.• Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.• Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.

Sumber:
Surono, 2013

TERIMA KASIA

